

46

✓

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI, BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, PUSAT DOKUMENTASI HUKUM	
SIKIP	Kempas
NO. 11701	Rabu 13 Mei 1975
01/18	IV/3-7.
01/18	28

Integrasi dan Asimilasi

Dalam Kerangka Bhinneka Tunggal Ika

Oleh Budiono Kusumohamidjo

MASALAH mayoritas dan minoritas dalam masyarakat adalah masalah yang umurnya sudah setua fakta kebersamaan hidup manusia dan juga akan terus bertahan selama ada masyarakat.

Karena masalah ini sudah nyaris merupakan karakter yang melekat pada kebersamaan hidup manusia, pertanyaan yang harus dijawab kemudian seharusnya bukanlah yang berbunyi bagaimanakah caranya mengatasi atau menghapuskan masalah itu, melainkan lebih bersifat upaya untuk mencegah; bahwa masalah mayoritas maupun minoritas dalam masyarakat itu tidak berkembang atau melebar sebagai bencana yang dapat memukul baik kaum minoritas (Negro di Amerika Serikat, Yahudi di Eropa, Cina di Indonesia) maupun kaum mayoritas (rakyat Indonesia di zaman penjajahan, Kaledonia Baru, rakyat jelata di negara-negara totaliter) atau juga kedua belah pihak (Irlandia Utara, Lebanon).

Bencana itu umumnya dapat dibaca sebagai penindasan yang satu terhadap yang lain, tetapi bisa juga menampilkan diri sebagai perang teror serta perang saudara yang berkepanjangan.

Setelah Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis yang melahirkan nasionalisme, usaha mengatasi dan mencegah penindasan lalu menjelma menjadi tugas utama dari setiap negara kebangsaan yang modern. Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan cita-cita kemerdekaan "bagi segenap bangsa Indonesia" tanpa merinci asal-usul etnis, konfesional maupun sosial-ekonomis.

Menurut pengamatan, rasanya tidak ada konstitusi yang menunjukkan cita-cita pendirian negara untuk "sebagian tertentu dari bangsa kita". Lewat Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis manusia belajar dari sejarah dan sesudahnya merasa tidak patut untuk kembali ke zaman polis Yunani kuno yang membedakan warga kekaisaran yang merdeka dari warga propinsi-propinsi yang ditaklukkan. Apa boleh buat, 200 tahun setelah Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, di banyak bagian dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Prancis sendiri masih terdapat lebih dari cukup

orang dan kelompok orang yang tidak percaya, bahwa di hadapan Tuhan semua orang tanpa kecuali sebenarnya sama.

Juga Indonesia tidak dapat cuci tangan dari kenyataan ini. Namun demikian tidak dapat cuci tangan dari kenyataan ini. Namun demikian tantangan kita adalah bahwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan maksud yang luhur untuk mengatasi dan mengakhiri penindasan dan secara etnis sekaligus mewajibkan para pendiri Republik maupun para ahli-warisnya untuk tidak menggantikan kedudukan para penindas sebelumnya.

Dalam kerangka ini persoalan siapa menindas siapa tidak terlalu relevan lagi, karena seperti dapat kita saksikan dalam berbagai kasus, tidak hanya kelompok mayoritas dapat menindas kelompok minoritas. Dalam kondisi tertentu dapat saja terjadi sebaliknya. Kendati demikian, kenyataan lain yang harus dihadapi dan diterima adalah bahwa penindasan sudah dikenal sejak dulu. Mengingat panjangnya sejarah umat manusia, sangat tipis juga harapan untuk dapat memupuskan penindasan dari muka bumi. Itulah sebabnya, bila usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi keseluruhan suatu

bangsa juga merupakan tujuan yang lebih realistis dari setiap pendirian negara.

Penindasan

Pendirian negara untuk mencapai tujuan yang realistis kendati demikian juga perlu didasarkan pada kenyataan yang ada. Para pendiri Republik merumuskan kenyataan Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai rumus, Bhinneka Tunggal Ika merupakan konstataasi yang padat mengenai suatu konstelasi yang kompleks. Kita umumnya bangga memiliki rumus yang

pukah kita toleran terhadap keanekaragaman itu dan mampukah kita menegakkan kesatuan yang aneka-ragam? Kita mungkin kurang suka mengakui, bahwa kebhinnekaan itu sering merupakan penghambat dalam usaha menyusun berbagai konsensus nasional atau dalam merumuskan sasaran serta melaksanakan pembangunan, kita sebaiknya tidak berilusi mengenai indahnya keanekaragaman dan lebih berguna mengakui besarnya kemungkinan, bahwa mencapai kesatuan pendapat di Jepang adalah lebih mudah daripada yang dapat dilakukan di India. Artinya, bangsa yang menyadari kebhinnekaan dirinya perlu sadar, bahwa dia menghadapi syarat-syarat yang lebih berat dari bangsa yang homogen untuk dapat tegak sebagai bangsa dalam ikatan negara yang modern. Konsekuensinya ialah, Bhinneka Tunggal Ika lebih baik dimengerti sebagai *national mission* yang historis daripada sebagai mitos yang tidak jelas gunanya untuk masa depan.

Sebagai misi nasional Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dihayati secara primordial, dalam arti, di satu pihak kita bangsa karena terdiri dari berbagai macam kultur dan subkultur, di lain pihak kita juga gandrung pada keseragaman dan proses uniformisasi. Juga tidak tepat untuk membanggakan struktur geografis Indonesia yang nyaris tidak ada duanya di dunia, dan pada saat yang bersamaan sengaja atau tidak sengaja memusatkan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial maupun proses pembuatan keputusan politik di Jawa saja.

Sebaliknya, sebagai misi nasional "Bhinneka Tunggal Ika" hanya akan mempunyai makna bagi masa depan bila ditunjang

MDV dan Istrinya
kemarikan. HLA dan Istrinya
kabur ke luar negeri. Tanggal 17/11
inilah...
1 erian...
JFA

yang dikemukakan atas Bhinneka Tunggal Ika sebagai cuma basa-basi belaka. Dalam keadaan demikian Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi slogan belaka yang tidak ada muatan maupun manfaatnya. Betapa pun luhur "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai formula, manusia adalah tetap lebih mulia daripadanya. Itulah sebabnya formula Bhinneka Tunggal Ika harus mengabdikan pada cita-cita manusia Indonesia yang tidak boleh merupakan cita-cita yang tidak luhur. Dengan menyatakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengakuan akan konstelasi kebangsaan, bangsa Indonesia sudah memastikan diri untuk suatu cita-cita yang mulia, yaitu bahwa kita hendak menegakkan kehidupan bersama yang anti-penindasan, anti-diskriminasi dan anti-rasialisme bagi semua perbedaan dan perbedaan.

Persoalan kita sekarang ialah, apakah kita sungguh-sungguh dewasa sebagai bangsa dan sungguh menghendaki tegaknya perbedaan antara suatu bangsa yang merdeka dan berharga diri dari suatu bangsa terjajah yang memang terpaksa memberi toleransi pada penindasan, diskriminasi dan rasialisme.

Integrasi dan asimilasi

Integrasi dan asimilasi adalah konsep antropologi yang diangkat ke panggung politik sebagai instrumen dalam usaha mengatasi ketegangan maupun konflik yang kronis dan lebih-lebih lagi yang akut.

Integrasi adalah proses atau juga usaha menempatkan kelompok pendukung kultur atau elemen kultur yang asing sedemikian rupa ke dalam kelompok pendukung kultur serta kompleks kultur reseptor (penerima), sehingga kelompok pendukung kultur serta elemennya itu diterima sebagai subkultur tanpa harus kehilangan kepribadiannya.

Asimilasi adalah proses atau usaha meleburkan suatu kelompok pendukung kultur atau elemen kultur seluruhnya ke dalam suatu masyarakat pendukung dan kompleks kultur reseptor. Dalam proses itu identitas dari kelompok pendukung kultur serta elemen budayanya yang diresepsi juga lebur dan kehilangan identitasnya.

Sebagai proses kebudayaan, baik integrasi maupun asimilasi merupakan pelengkap proses akulturasi (bukan akulturasi), dalam mana terjadi perjumpaan antar-kebudayaan, baik antar-pendukung, maupun elemen kebudayaannya. Akulturasi selalu mengandung implikasi positif maupun negatif. Positif dalam arti dia selalu memperkaya salah satu atau lebih kompleks kebudayaan yang bertemu. Akulturasi sebaliknya juga bisa berimplikasi negatif karena hampir selalu menimbulkan pergesekan yang konflik-tual sifatnya dan kadang-kadang juga mengeliminasi salah satu dari kompleks kebudayaan yang bertemu atau malahan juga salah satu dari kelompok pendukung kebudayaan.

Dalam sejarah, terbukti bahwa konflik yang timbul sebagai akibat dari akulturasi dan tidak teratasi seringkali bermuara dalam penindasan. Pada tingkat yang ekstrem dia bisa mengambil bentuk sebagai genoside.

Dalam konteks kebudayaan dan kehidupan bersama, integrasi dan asimilasi berfungsi mencegah bencana itu. Persoalan yang timbul ialah, bagaimana hubungan antara integrasi dan asimilasi sebagai konsep antropologi kultural dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rumus dari persepsi dan pengakuan akan suatu konstelasi yang heterogen dan pluralistik yang politis, etnis, sosiologis dan ekonomis sifatnya?

Bila dikembalikan kepada makna konseptual dari pengertian "integrasi" dan "asimilasi", proses dan konsep integrasi tepat untuk mewujudkan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai misi nasional. Sebaliknya, asimilasi bertentangan dengan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai idealisme, lebih-lebih bila asimilasi itu ditujukan kepada dan diharuskan bagi hanya satu atau dua kelompok pendukung atau kompleks kebudayaan dalam suatu masyarakat yang sangat heterogen dan pluralistik.

Dengan cara yang lebih konsekuen, dalam arti bila asimilasi ditujukan dan dilancarkan kepada dan untuk semua pendukung heterogenitas dan pluralitas, asimilasi akan mengeliminasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai idealisme. Artinya, asimilasi dan Bhinneka Tunggal Ika adalah dua konsep yang saling meniadakan.

Bhinneka Tunggal Ika membutuhkan baik perbedaan dan perbedaan maupun persatuan dan kesatuan supaya dapat mewujudkan diri sebagai kenyataan dalam kehidupan bersama. Asimilasi hanya menghendaki penyatuan dan tidak memberi tempat pada perbedaan dan apalagi perbedaan.

Bhinneka Tunggal Ika sebaliknya sangat memerlukan pelaksanaan integrasi yang konsekuen untuk menghindarkan kemungkinan, bahwa perbedaan dan perbedaan ditempatkan atau menempatkan diri dalam penyatuan, tetapi tanpa menjamin adanya keutuhan. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika mensyaratkan bukan hanya *united and unified diversities*, tetapi terutama juga *integrity*. Perlu dicatat, Bhinneka Tunggal Ika memerlukan *united and unified diversities*, namun tidak mungkin memberi tempat pada *uniformed diversities*.

Integrasi demi Bhinneka Tunggal Ika

Karena "Bhinneka Tunggal Ika" menghendaki atau mencita-citakan tidak hanya persatuan, melainkan lebih-lebih keutuhan, dan dalam pada itu memberi tempat yang layak pada setiap diversitas (yang dari Tuhan jua datangnya), integritas lalu merupakan konsep yang nampaknya tepat bagi pembangunan bangsa.

Namun, karena di dunia ini tidak ada hal yang jatuh dari langit, pelaksanaan konsep integrasi tergantung dari sejumlah kondisi. Syarat terpenting adalah kemauan politik untuk memahami konsep itu dalam konteks kebudayaan yang menjadi semakin canggih dan kompleks dalam proses sosial. Artinya, meskipun konsep itu boleh dan dapat digunakan sebagai instrumen politik, integrasi tidak dapat digunakan untuk tujuan uniformisasi dan apalagi asimilasi. Syarat kedua adalah juga kemauan politik untuk menghargai kenyataan, bahwa masyarakat yang mendukung kebudayaan yang canggih dan kompleks juga mengimplikasikan pluralitas dan seperti di Indonesia malahan juga heterogenitas.

yang natural, sedangkan kita memerlukan solusi politik dalam mana konsep integrasi dapat sangat berguna, integrasi harus dikembangkan menjadi program politik untuk memenuhi salah satu kepentingan nasional yang utama, yaitu membangun bangsa yang utuh.

Di samping persamaan sejarah, pandangan hidup dan cita-cita sebagai basis pengertian "bangsa" untuk Indonesia, integrasi dan integritas nasional boleh jadi merupakan bagian tak terpisahkan dari basis itu. Soalnya kita tidak punya pilihan lain. Apa pun justifikasi historis dan politis yang dapat dirumuskan bagi pendirian Republik 17 Agustus 1945, kita kini sudah kepalang menyatakan diri sebagai satu bangsa dan malahan lebih dari itu kita sudah kepalang menyatakan diri sebagai bangsa yang besar. Jadi, kita harus membuktikan, bahwa kita sungguh-sungguh merupakan bangsa yang besar. ***

* Artikel ini merupakan bahan ceramah Budiono Kusumohamidjojo, dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam sebuah pertemuan di Jakarta tanggal 3 Maret 85.